



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 6, No. 2, 2025

DETERMINAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN RUPIT PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rafi AL-Fiansyah¹, Anggeraini Oktarida², Muhammad Husni Mubarak³

¹Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

²Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

³Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

raffielen625@gmail.com^{1*}, anggeraini_oktarida@polsri.ac.id², mhusnimubarak@polsri.ac.id³

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the influence of Apparatus Competence, Accountability and the Government's Internal Control System on Village Fund Management in Rupit District. The population in this study were 16 villages in Rupit District. This research used a saturated sampling technique with 64 respondents. Data was collected by distributing questionnaires directly to respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression with the help of SPSS 29 software. The results of this research show that Apparatus Competence, Accountability and the Government's Internal Control System partially and simultaneously have a positive and significant effect on Village Fund Management. The Adjusted R Square value is 0.621, which means that Apparatus Competence, Accountability and the Government's Internal Control System have an influence of 62.1% on Village Fund Management.

Keywords: *Competency, Accountability, Internal Control System*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rupit. Populasi dalam penelitian ini adalah 16 desa di Kecamatan Rupit. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh dengan responden sebanyak 64 responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 29. Hasil penelitian ini menunjukkan Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,621 yang berarti Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh sebesar 62,1% terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci: Kompetensi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern

PENDAHULUAN

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada desa atas status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan undang-undang ini, desa diberi otoritas untuk mengatur dan mengurus desanya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Ini berarti bahwa dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa. Pemerintah pusat memberikan autonomi kepada desa agar mereka dapat mengelola keuangannya sendiri demi kemakmuran masyarakatnya.

Besarnya jumlah uang yang diterima oleh setiap desa menjadi sumber kekhawatiran bagi banyak pihak. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan kegiatan pemerintah desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan hingga masa pemeriksaan. Banyak jenis kesalahan yang dapat terjadi dalam pengelolaan dana desa, terutama yang berkaitan dengan operasional atau kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan desa. Kesalahan yang mungkin terjadi antara lain tidak adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa dan atau masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun penganggaran sampai pada tahap akhir evaluasi.

Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, memberikan penghargaan kepada 14 desa yang ada di Sumatera Selatan. Salah satu desa tersebut adalah desa Bingin Rupit yang terletak di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Prestasi tersebut menyatakan kinerja keberhasilan dalam mengelola dana desa sekaligus dapat dimaknai sebagai keberhasilan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan fenomena yang sudah diuraikan sebelumnya, pengelolaan keuangan desa juga memerlukan kompetensi yang baik dari para aparatur desa. Kemampuan mereka dalam menjalankan tugas administratif dan keuangan secara efisien menjadi landasan utama dalam menjaga keterbukaan dan kejujuran. Selanjutnya, akuntabilitas menjadi prinsip penting yang harus ditegakkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Dengan melakukan pelaporan yang transparan dan terbuka, kesempatan untuk adanya praktik penyelewengan akan berkurang secara signifikan. Terakhir, sistem pengendalian intern pemerintah yang kuat menjadi pondasi dalam menjaga integritas keuangan desa. Dengan adanya mekanisme pengawasan internal yang efektif, peluang untuk adanya manipulasi atau penyalahgunaan dana desa dapat diminimalisir, sehingga dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Kompetensi Aparatur dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu, organisasi, masyarakat untuk berhasil mengidentifikasi, dan mencapai tujuan. Kompetensi aparatur desa sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa dan pengalokasian dana desa. Saputra et al., (2019), mengatakan bahwa kompetensi aparatur mempunyai peranan penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian masyarakat desa, hubungan sosial, budaya dan bidang lainnya, terlebih aparatur nantinya akan diawasi dan bersentuhan langsung dengan badan pengawas keuangan yang independen yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengawasi penggunaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh (Pahlawan et al., 2020), dimana semakin tingginya tingkat kemampuan kompetensi pada aparatur desa maka akan meningkat pula pengelolaan dana desa.

Saputra et al., (2019) menyatakan dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang yang sama dengan peluang dan memberikan kepercayaan/amanah oleh masyarakat/individu. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya akan ada nantinya suatu keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi. Akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab pihak yang telah menerima kepercayaan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pihak yang mempercayainya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mutia Basri et al., 2020), mengatakan bahwa aparatur desa sudah mempunyai akuntabilitas yang tinggi terhadap pengelolaan dana desa sehingga akan terjadi keberhasilan pengelolaan dana desa.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan penuh terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektivitas dan efisiensi, kepercayaan terhadap pelaporan keuangan, keamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari (Nursin et al., 2023), yang menunjukkan hasil bahwa hasil dari variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdapat pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rupit.

Berdasarkan perbedaan hasil dari beberapa penelitian tersebut, Penelitian ini mencoba untuk mengkaji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yang berupa kompetensi aparatur, akuntabilitas, dan sistem pengendalian *intern* pemerintah di kecamatan rupit yang digunakan oleh penelitian terdahulu.

KAJIAN LITERATUR

Teori Atribusi

Menurut Herliza & Setiawan, 2019 “Teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif dimana individu yang menjelaskan perilaku mereka dalam kaitannya dengan aspek-aspek tertentu dari lingkungan yang relevan”. Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dalam kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain. Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar atau eksternal, yaitu orang yang dianggap terpaksa oleh keadaan.

Teori Stewardship

Penelitian ini juga menggunakan teori stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis pada tahun 1991, Teori *stewardship* adalah bagian dari teori agensi yang menggambarkan keadaan dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi ditunjukkan untuk kepentingan organisasi. Menurut Donaldson teori *stewardship* menggambarkan bagaimana manajemen dalam suatu pemerintahan diwajibkan untuk memberikan pelayanan dan demi kepentingan prinsipal. Manajemen di pemerintahan terutama berfungsi sebagai pelayan masyarakat daripada agen yang berorientasi pada keuntungan. Tujuan utama dari pemerintahan desa adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa setempat. Pemerintah desa tidak bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kesejahteraan warga desa terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, pemerintah desa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai layanan dan program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Kompetensi Aparatur

Kompetensi aparatur desa adalah kemampuan yang mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan mental, berpikir, dan menjadi sumber perubahan yang esensial dalam pemecahan masalah di lingkungan desa. Aspek mental yang kuat menjadiah landasan penting bagi aparatur desa untuk bekerja dengan penuh integritas, dedikasi, dan tanggung jawab. Kompetensi ini tidak hanya terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan sikap profesional yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik secara efektif. Kompetensi aparatur desa melibatkan kapasitas yang dimiliki oleh individu untuk menghadapi tantangan dan situasi kompleks dalam pekerjaan sehari-hari di desa. Tujuan utama dari kompetensi ini adalah memastikan bahwa aparatur desa memiliki semua keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Aprilia & Yuniasih et al., (2021) mengatakan bahwa kompetensi aparatur desa harus menggunakan pemahaman akuntansi yang baik dan benar sehingga nantinya mampu mengelola keuangan yang profesional dan baik. Menurut Nofiar et al., (2021), menjelaskan beberapa indikator-indikator yang terkandung dalam kompetensi aparatur sebagai berikut:

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Kemampuan/Keterampilan
4. Sikap

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalannya, pada pemberi amanah puas dengan kinerja pelaksana kegiatan Mulyanto, (2021). Lukito (2014:2) memaparkan bahwa akuntabilitas adalah suatu jenis tanggung jawab bagi mereka yang menyelenggarakan acara-acara publik untuk menjelaskan dan menjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan seluruh proses yang telah dilakukan, serta mempertanggungjawabkan hasil dan kinerjanya. Ada lima dimensi akuntabilitas menurut Fitriana & Andrian (2020) yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
2. Akuntabilitas manajerial

3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan
5. Akuntabilitas Finansial

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada kerangka konseptual PP No. 60 Tahun 2008 merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan penting yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi melalui kerja yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan kekuatan hukum dan peraturan undang-undang. Tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada PP No. 60 Tahun 2008 menjelaskan SPIP terdiri atas beberapa unsur yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa menjelaskan bahwa dana desa mencakup segala hak dan tanggung jawab desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan harta benda yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang termasuk mengatur, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam sistem penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dikatakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah pusat menganggarkan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk setiap tahun. Dana desa tersebut harus dikelola secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara efektif, ekonomis, efisien, transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keadilan dalam mengutamakan kepentingan masyarakat di desa tersebut. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri yang merupakan indikator untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana desa:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rupit Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 16 Desa yang ada di Kecamatan Rupit Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah kusioner dengan jenis sampel jenuh, sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang pada masing-masing Desa dengan kriteria kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kaur keuangan yang berjumlah 64 responden. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah pengujian validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis dengan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Uji ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 29.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
1.	Kompetensi Aparatur (X1)	X1.1	0,313	0,2461	Valid
		X1.2	0,531	0,2461	Valid
		X1.3	0,650	0,2461	Valid
		X1.4	0,476	0,2461	Valid
		X1.5	0,516	0,2461	Valid
		X1.6	0,540	0,2461	Valid
		X1.7	0,476	0,2461	Valid
		X1.8	0,507	0,2461	Valid
		X1.9	0,502	0,2461	Valid
		X1.10	0,443	0,2461	Valid
2.	Akuntabilitas (X2)	X2.1	0,597	0,2461	Valid
		X2.2	0,461	0,2461	Valid
		X2.3	0,486	0,2461	Valid
		X2.4	0,541	0,2461	Valid
		X2.5	0,335	0,2461	Valid
		X2.6	0,544	0,2461	Valid
		X2.7	0,409	0,2461	Valid
		X2.8	0,568	0,2461	Valid
		X2.9	0,605	0,2461	Valid
3.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)	X3.1	0,597	0,2461	Valid
		X3.2	0,708	0,2461	Valid
		X3.3	0,570	0,2461	Valid
		X3.4	0,439	0,2461	Valid
		X3.5	0,628	0,2461	Valid
		X3.6	0,542	0,2461	Valid
		X3.7	0,708	0,2461	Valid
4.	Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y1	0,672	0,2461	Valid
		Y2	0,548	0,2461	Valid
		Y3	0,405	0,2461	Valid
		Y4	0,670	0,2461	Valid
		Y5	0,573	0,2461	Valid
		Y6	0,377	0,2461	Valid

		Y7	0,532	0,2461	Valid
--	--	----	-------	--------	-------

Sumber: data diolah (2024) SPSS 29 Version

Dari hasil pengelolaan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil suatu keputusan jika Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengelolaan Dana Desa dengan berpedoman dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, diperoleh hasil yang valid dan lolos uji validitas sebab memiliki nilai R-Hitung \geq R-Tabel dari setiap indikator.

Uji Realibilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N of Item	Cornbach Alpha	Nilai Kritis	Pengambilan keputusan
Kompetensi Aparatur	10	0,632	0,60	Reliabel
Akuntabilitas	9	0,632	0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	7	0,699	0,60	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa	7	0,605	0,60	Reliabel

Sumber: data diolah (2024) SPSS 29 Version

Dari tabel diatas hasil pengelolaan ini dinyatakan reliabel, sehingga sudah memenuhi prasyarat uji kualitas data tersebut sudah memiliki reliabilitas, karena tiap item atau instrumen penelitian memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar diatas \geq 0,60 atau tingkat reliabilitasnya memiliki keakuratan yang sangat tinggi, sehingga pada penelitian ini beberapa item pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh peneliti mampu diimplementasikan sebagai instrumen selanjutnya.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.46413456
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.052
	Negative	-.049
Test Statistic		.052
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

Sumber: data diolah (2024) SPSS 29 Version

Hasil perhitungan uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi dari nilai residual sebesar 0,200. Berdasarkan uji normalitas ini, karena nilai signifikansi yang diuji $>$ 0,05, dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.880	1.136
	X2	.835	1.198
	X3	.924	1.082

Sumber: data diolah (2024) SPSS 29 Version

Berdasarkan tabel yang sudah diuraikan diatas menunjukkan hasil *multikolinieritas* bahwa data yang digunakan dalam penelitian terbebas dari gejala multikolinieritas. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *Tolerance* $>$ 0,10 atau *VIF* $<$ 10 dari semua variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.111	2.314		.480	.633
	X1	.095	.053	.231	1.791	.078
	X2	-.038	.047	-.108	-.812	.420
	X3	-.080	.037	-.276	-2.193	.062

Sumber: data diolah (2024) SPSS 29 Version

Hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa variabel (kompetensi aparatur, akuntabilitas, dan sistem pengendalian intern pemerintah) terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi dari semua variabel lebih besar dari 0,05

Persamaan Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-5.560	3.929		-1.415	.162
	X1	.182	.090	.167	2.019	.048
	X2	.628	.080	.665	7.832	<.001
	X3	.125	.062	.162	2.012	.049

Sumber: data diolah (2024) SPSS 29 Version

Berdasarkan output pada tabel 6 diatas, Diketahui nilai *Unstandardized Coefficients* X1 sebesar 0,182, nilai *Unstandardized Coefficients* X2 sebesar 0,628, nilai *Unstandardized Coefficients* X3 sebesar 0,125, dan nilai Constanta sebesar -5,560. Maka didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -5,560 + 0,182X1 + 0,628X2 + 0,125X3$$

Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.799 ^a	.639	.621	1.500	2.012	

Sumber: data diolah (2024) SPSS 29 Version

Berdasarkan yang akan terjadi pengujian koefisien determinasi pada tabel diatas, memberikan bahwa nilai *Adjusted R Square* 0,621 yang merupakan besarnya variabel independen yaitu Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempengaruhi variabel dependen Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar (0,621 x 100 = 62,1 %), sedangkan sisanya (100% - 37,9 = 37,9%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian. Semakin besar nilai *Adjusted R Square* maka artinya dampak suatu variabel Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengelolaan Dana Desa, semakin memiliki pengaruh yang kuat.

Uji Statistik t

**Tabel 8. Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.560	3.929		-1.415	.162
	X1	.182	.090	.167	2.019	.048
	X2	.628	.080	.665	7.832	<.001
	X3	.125	.062	.162	2.012	.049

Sumber: data diolah (2024) SPSS 29 Version

Berdasarkan tabel tersebut diketahui Kompetensi Aparatur (X1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,019 dan t_{tabel} sebesar 2,000 maka dapat diketahui $2,019 > 2,000$ sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima H_a ditolak. Nilai Sig adalah 0,048 maka $0,048 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas (X2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 7,832 dan t_{tabel} sebesar 2,000 maka dapat diketahui $7,832 > 2,000$ sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima H_a ditolak. Nilai Sig adalah 0,001 maka $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,012 dan t_{tabel} sebesar 2,000 maka dapat diketahui $2,012 > 2,000$ sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima H_a ditolak. Nilai Sig adalah 0,049 maka $0,049 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Uji Statisti F

**Tabel 9. Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	238.807	3	79.602	35.365	<.001 ^b
	Residual	135.052	60	2.251		
	Total	373.859	63			

Sumber: data diolah (2024) SPSS 29 Version

Berdasarkan estimasi uji F diperoleh hasil F_{hitung} sebesar 35,365, dengan membandingkan F_{tabel} dan taraf nyata 0,05. F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($35,356 > 2,758$) maka diinterpretasikan jika terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen: Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara bersama-sama terhadap variabel dependen Pengelolaan Dana Desa (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Aparatur (X1) Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Berdasarkan hasil estimasi regresi diperoleh Nilai t_{hitung} sebesar 2,019 dan t_{tabel} sebesar 2,000 dari hasil perbandingan maka dapat diketahui t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $2,019 > 2,000$ maka dapat disimpulkan H_0 diterima H_a ditolak dengan membandingkan besarnya taraf signifikan (sig) penelitian dengan taraf signifikan sebesar 0,05 maka $0,048 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur terdapat pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Artinya Kompetensi Aparatur pada Kecamatan Rupit sudah maksimal yang diukur dari semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa maka semakin mempengaruhi tingkat pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh (Pahlawan et al., 2020), dimana semakin tingginya tingkat kemampuan kompetensi pada aparatur desa maka akan meningkat pula pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu mengelola dana desa dengan baik. Tingginya kompetensi aparatur desa dapat berasal dari tingkat

pendidikan yang ditempuh oleh aparatur desa. Selain itu, kompetensi juga dibentuk melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melatih aparatur desa dalam pengelolaan desa. Melalui upaya ini maka kompetensi aparatur desa akan meningkat dan mempengaruhi pengelolaan dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas (X2) Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Berdasarkan hasil estimasi regresi diperoleh Nilai t-hitung sebesar 7,832 dan t-tabel sebesar 2,000 dari hasil perbandingan maka dapat diketahui t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu $7,832 > 2,000$ maka dapat disimpulkan H_0 diterima H_a ditolak dengan membandingkan besarnya taraf signifikan (sig) penelitian dengan taraf signifikan sebesar 0,05 maka $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas terdapat pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Dimana artinya semakin tinggi atau rendah akuntabilitas yang dimiliki aparatur desa akan mempengaruhi pengelolaan dana desa di Kantor Desa Se-Kecamatan Rupit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mutia Basri et al., 2020), mengatakan bahwa aparatur desa sudah mempunyai akuntabilitas yang tinggi terhadap pengelolaan dana desa sehingga akan terjadi keberhasilan pengelolaan dana desa. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, dalam hal ini perangkat desa harus terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangan sehingga besar harapan perangkat desa dapat mengelola keuangan dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, dan transparantif. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh publik dan institusi pengawasan yang mempunyai konsekuensi hukum, maka aparatur pelaksana pemerintah akan berupaya menerapkan konsep akuntabilitas tersebut dalam pengelolaan pemerintah termasuk pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Berdasarkan hasil estimasi regresi diperoleh Nilai t-hitung sebesar 2,012 dan t-tabel sebesar 2,000 dari hasil perbandingan maka dapat diketahui t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu $2,012 > 2,000$ maka dapat disimpulkan H_0 diterima H_a ditolak dengan membandingkan besarnya taraf signifikan (sig) penelitian dengan taraf signifikan sebesar 0,05 maka $0,049 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdapat pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Artinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kecamatan Rupit sudah maksimal yang diukur dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi, komunikasi dan juga pemantauan pengendalian intern ini dapat menunjang kegiatan pengelolaan dana desa di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hasil ini sejalan dengan penelitian dari (Nursin et al., 2023), yang menunjukkan hasil bahwa hasil dari variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdapat pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rupit. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi stewardship theory yang dimana keberadaan pemerintah desa sebagai penatalayanan (*steward*) harus bertanggung jawab atas hal-hal yang dipercayakan oleh masyarakat sebagai principal. Pertanggungjawaban ini dalam bentuk penyajian laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban yang baik. Laporan pertanggungjawaban yang baik dapat tercipta apabila terdapat pengendalian dan pengawasan yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan keyakinan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan.

Pengaruh Kompetensi Aparatur (X1), Akuntabilitas (X2), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Berdasarkan hasil estimasi jika F-hitung lebih besar dari F-tabel ($35,356 > 2,758$) maka diinterpretasikan jika terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen: Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara bersama-sama terhadap variabel dependen Pengelolaan Dana Desa (Y). Artinya Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Rupit sudah maksimal yang diukur dari pencapaian tujuan, ketepatan waktu, sesuai manfaat dan hasil sesuai harapan masyarakat serta dipengaruhi juga dengan kompetensi aparatur, akuntabilitas, dan sistem pengendalian intern pemerintah yang membuat pengelolaan dana desa di Kecamatan Rupit semakin membaik.

Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Basri et al., 2021), dimana memperoleh hasil penelitian Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kualitas SDM mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Rokan Hulu. Maka Ho diterima dan Ha ditolak dimana jika Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Intern diimplementasikan secara bersama-sama dan seimbang dengan ketiga aspek tersebut, maka Pengelolaan Dana Desa semakin meningkat dan kinerja para aparatur desa juga semakin meningkat, karena Pengelolaan Dana Desa memenuhi ketiga aspek tersebut yaitu Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KESIMPULAN

Kompetensi Aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rupit. Semakin tinggi Kompetensi Aparatur Desa, semakin baik Pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rupit. Tingginya Akuntabilitas Aparatur Desa mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rupit. Sistem Pengendalian di Kecamatan Rupit sudah maksimal dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 62,1% terhadap pengelolaan dan desa di Kecamatan Rupit.

DAFTAR LITERATUR

- Aprilia, K. W. Indah, & N. W. Yuniasih. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu, dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2, No.2, April, hlm. 25- 45. Universitas Hindu Indonesia. Denpasar.
- Basri, Y. M. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. Riau.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian of Management*, 16: 49-64.
- Fitriana, R. & Andrean. (2020). Tinjauan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 11, No 1.
- Herliza, Y., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Locus Of Control, Turnover Intention, Komitmen Organisasi dan Kecerdasan Emosional Spiritual Quotient (Esq) Terhadap Dysfunctional Audit Behavior. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1589-1603. <http://doi.org/10.24036/jea.v1i3.164>.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Kedepan*. Jakarta: Grasindo.
- Mulyanto, Intan, C., D., & Joko, S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Intern, Motivasi, Budaya Organisasi, dan Asimetri Informasi Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi Pada Desa SE-Kabupaten Kudus).
- Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>.
- Nofiar, dkk. (2021). Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Wisasan Jaya Makmur Kota Tangerang. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* Vol. 4, No. 4.
- Nursin, D., Syamsuddin, S., & Nirwana, N. (2022b). Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 77–101. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1359>.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang RI No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. DPR RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa. DPR RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. DPR RI. Jakarta.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>.
- Saputra, K. A. K., Pradyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168-176. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>.